

INTERNASIONALISASI KONFLIK SURIAH DAN PERAN INDONESIA

Adirini Pujayanti*)





Abstrak

Konflik Suriah tidak lagi menjadi persoalan domestik Suriah semata, tetapi telah melebar ke negara-negara tetangga dan menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Potensi perluasan konflik Suriah sangat terbuka karena posisi negara tersebut di episentrum pertarungan politik kawasan. Saat ini ada tiga konflik bersinggungan dengan krisis Suriah, yakni konflik Arab-Israel, konflik internal Lebanon, dan isu nuklir Iran. Indonesia merupakan bagian komunitas dunia, dan dalam konteks untuk mengupayakan perdamaian global, Indonesia harus bersikap lebih aktif mencari solusi damai dalam konflik panjang Suriah. Sebagai negara muslim terbesar yang disegani di dunia internasional, Indonesia dapat melakukan pendekatan informal kepada pihak yang bertikai agar mau mencari solusi damai dalam konflik Suriah.

A. Pendahuluan

Pemerintahan rezim Al-Assad di Suriah terus mendapat kecaman dunia karena aksi kekerasan terhadap warga negaranya sendiri yang telah menewaskan lebih dari 90.000 jiwa. Oleh sebab itu negara-negara Barat dan Arab mendesak agar Presiden Bashar al-Assad mengundurkan diri sebagai langkah awal menuju perdamaian. Presiden Bashar al-Assad menolak desakan tersebut dan bahkan menegaskan, perlawanan negaranya terhadap Israel akan semakin keras. Kemungkinan konflik baru antara Suriah-Israel ini berbahaya bagi stabilitas keamanan Timur Tengah.

Upaya damai terakhir yang dilakukan masyarakat internasional adalah menyelenggarakan Konferensi Jenewa II atas prakarsa AS dan Rusia. Dalam konferensi tersebut kedua pihak bersengketa diharapkan dapat duduk bersama membentuk sebuah pemerintah transisi dengan wewenang eksekutif penuh. Namun Konferensi Jenewa II tampaknya belum dapat terlaksana dalam waktu dekat akibat berbagai perbedaan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam konflik ini. Isu terakhir yang menghambat proses tersebut adalah pro kontra pengiriman melibatkan senjata yang kepentingan Kondisi Suriah semakin banyak negara.

Info Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI www.dpr.go.id ISSN 2088-2351



Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: apujayanti@yahoo.com

memprihatinkan setelah Pemerintah Suriah ditengarai menggunakan senjata gas kimia beracun untuk menumpas oposisi. Penggunaan senjata kimia oleh pasukan Suriah sulit terdeteksi karena tidak meninggalkan bau dan warna.

Diperkirakan akan ada tiga juta lebih pengungsi Suriah ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, Turki dan Irak hingga akhir tahun 2013. Badan PBB yang menangani pengungsi -UNHCR- telah meminta negara-negara Eropa untuk menerima penempatan lebih dari satu juta pengungsi Suriah di negaranya, namun belum mendapat tanggapan.

B. Kepentingan Internasional dalam Konflik Suriah

Konferensi Menjelang Perdamaian Jenewa II, Uni Eropa (UE) sepakat untuk mengizinkan pengiriman senjata membantu kelompok oposisi Suriah. Keputusan ini diambil setelah anggota UE gagal untuk memperbaharui embargo senjata ke Suriah. UE menilai pengiriman senjata kepada oposisi akan mendorong Pemerintahan al-Assad untuk memulai perundingan penyelesaian konflik. Hal ini sekaligus sebagai peringatan kepada rezim al- Assad bahwa UE siap membantu pejuang oposisi untuk menyeimbangkan kekuatan persenjataan.

Pengiriman senjata kemungkinan dilaksanakan setelah 1 Agustus 2013 untuk memberi kesempatan proses perdamaian yang digagas oleh AS dan Rusia terlaksana terlebih dahulu. Pencabutan embargo senjata terhadap Suriah tidak disertai dengan pencabutan paket sanksi UE kepada rezim Assad. Sanksi lain di luar embargo senjata, termasuk pembekuan aset keluarga Assad dan kroninya, serta pembatasan perdagangan dalam transaksi minyak dan keuangan tetap diberlakukan.

Rusia yang merupakan sekutu Pemerintahan Assad menilai pencabutan embargo akan mengganggu prospek konferensi Jenewa II. Rusia membuat 'aksi tanding' dengan rencana mengirimkan sistem rudal antipesawat S-300 kepada Pemerintahan Al-Assad sebagai faktor penyeimbang dan pencegah intervensi asing di Suriah. Sistem rudal anti-pesawat S-300 adalah sistem rudal darat ke udara yang setara dengan rudal Patriot milik AS. Rudal ini dirancang Rusia untuk mencegat pesawat atau rudal-rudal lain yang telah digelar NATO di perbatasan Turki-Suriah. Rusia memiliki kontrak pembelian senjata yang disepakati tahun 2010 tersebut bernilai US\$1 miliar. Namun menunda pengiriman senjata tersebut bahkan tanpa batasan waktu selama konflik Suriah berlangsung.

Upaya menekan Pemerintahan Assad dalam forum DK PBB selalu mendapat tentangan dan veto dari Rusia dan China. Masalah Suriah merusak hubungan baik Uni Eropa dengan Rusia, dan menjadi sumber perselisihan pendapat kedua pihak. Hubungan bilateral kedua pihak saat ini menjadi yang terburuk semenjak era pasca-Soviet.

Israel merasa sangat terancam dengan keputusan Rusia untuk mengirim sistem peluru kendali canggih ke Suriah. Israel menjadi seteru Pemerintahan Assad yang ditengarai memasok senjata kepada kelompok militan Hizbullah di Lebanon, yang selama ini gencar melakukan perlawanan terhadap Israel. Pemerintahan Assad menegaskan Suriah dan Hizbullah kini berada dalam satu barisan. Milisi Hezbollah diperkirakan telah mengirim 3000-4000 milisi untuk membantu pasukan rezim Assad untuk melawan oposisi. Sejak meletusnya perang saudara di Suriah Maret 2011, setidaknya telah tiga kali Israel menggempur sejumlah lokasi di Suriah yang dicurigai sebagai lokasi senjata untuk Hizbullah. penyimpanan Keterlibatan Hizbullah dalam konflik ini memperdalam keretakan Suni dan Syiah di wilayah ini dan menimbulkan potensi konflik baru.

Keberadaan milisi Hizbullah berada di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon juga menjadi sumber keberatan Lebanon. Konflik Suriah telah meluas ke wilayah Libanon. Perbatasan Libanon–Suriah kerap digunakan kelompok oposisi Suriah untuk menyelundupkan senjata guna melawan Pemerintahan Al-Assad. Pihak militer Suriah telah mengancam akan memindahkan peperangan Suriah ke Lebanon sebagai reaksi kegiatan tersebut. Di lain pihak 100.000 milisi asing diduga masuk ke Suriah atas bantuan Turki, Arab Saudi dan Qatar untuk membantu pasukan oposisi.

AS mendukung keputusan UE untuk memberikan bantuan senjata kepada oposisi Suriah. Pemerintah AS telah menegaskan penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad kepada terhadap oposisi melanggar garis batas kemanusiaan sehingga dapat menjadi alasan untuk intervensi internasional. AS selama ini memutuskan untuk tidak mengirimkan bantuan senjata canggih kepada pihak oposisi Suriah karena salah satu kelompok oposisi Suriah yakni al-Nusra berafiliasi dengan jaringan Al Qaidah. Namun kebijakan baru Rusia, intervensi milisi Hizbullah dan posisi terdesak oposisi telah mengubah keputusan tersebut dan siap mengirimkan bantuan senjata kepada pihak oposisi Suriah.

C. Prospek Perdamaian Suriah yang Kian Pudar

Pro dan kontra bantuan senjata kepada oposisi Suriah menyebabkan prospek perdamaian Suriah dalam waktu dekat menjadi pudar. Pemerintah Suriah menyatakan bersedia mengikuti Konferensi Jenewa II, meski pesimis konferensi tersebut akan membuahkan hasil yang signifikan. Sebaliknya pihak Koalisi Nasional Suriah (NC) yang memayungi kubu oposisi belum memiliki satu sikap terhadap keikutsertaannya dalam konferensi.

Kubu oposisi tengah mengalami perpecahan, sumber perselisihan dalam kubu oposisi adalah keterwakilan dalam NC. Upaya internasional untuk memperluas dukungan bagi NC, payung kubu oposisi, gagal setelah NC yang didominasi kelompok Islamis tak mengakui blok liberal. Perseteruan di dalam oposisi disebabkan perebutan pengaruh antara figur yang disokong Arab Saudi dengan yang didukung Qatar. Qatar sejak awal mendukung oposisi yang didominasi kelompok Ikhwanul Muslimin. Arab Saudi yang didukung Barat

mendukung koalisi untuk menyelesaikan pertikaian dan memberikan tempat kepada kelompok liberal untuk mengimbangi dominasi kubu Islamis. Perpecahan di kalangan oposisi Suriah tidak hanya terjadi di tataran elite NC, tetapi juga di medan tempur yakni antar-pasukan oposisi. Elite NC dianggap gagal mewakili berbagai pandangan dari lapisan bawah dan semakin jauh teralienasi dari kondisi nyata di medan perang.

D. Sikap Indonesia

Indonesia merupakan muslim terbesar yang kedudukannya semakin penting di kancah internasional. Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan semua pihak yang terkait dalam masalah ini, Indonesia semestinya bisa berperan dan lebih bisa diterima dalam mengupayakan perdamaian di Suriah. Indonesia berprinsip kekerasaan dan tragedi kemanusiaan harus segera dihentikan, diikuti transisi politik sesuai dengan keinginan masyarakat Suriah sendiri. Dengan prinsip tersebut, Indonesia abstain dalam resolusi PBB yang mengakui pembentukan NC. Indonesia menunjukan kepedulian dalam konflik Suriah dengan menjadi bagian dari misi pemantau PBB dalam konflik Suriah. Indonesia juga telah pernah memanggil pulang duta besar Indonesia untuk Suriah ke Jakarta untuk menunjukkan sikap keprihatian Indonesia terhadap perkembangan konflik Suriah.

Konflik Suriah seharusnya menjadi momen bagi Indonesia bermain sebagai aktor perdamaian internasional. Indonesia belum memiliki cetak biru tentang visi strategis dalam mengupayakan perdamaian di wilayah konflik internasional. Visi adalah identifikasi dari tujuan akhir atau tujuan kegiatan yang akan dilakukan Indonesia. Visi itu harus realistis dan fokus. Pada saat Indonesia merancang visi strategis perdamaian internasionalnya, harus memperhatikan bukan saja lingkungan di mana visi dilaksanakan, tetapi yang terpenting adalah kapasitasnya untuk menjalankan visi itu. Dengan demikian tidak mudah bagi Indonesia berperan dalam masalah ini, karena kekuatan politik Indonesia tidak cukup kuat untuk menghadapi kepentingan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu hadir dan mendapatkan keuntungan dalam masalah ini.

Dalam konflik Suriah, aktor-aktor eksternal sangat dominan dengan perbedaan kepentingan yang tajam. Ada tiga tendensi dapat besar yang dimanfaatkan mendekatkan jurang kepentingan itu, yakni meningkatnya konfesionalisme, menguatnya radikalisme, dan jejaring akar rumput di kalangan rakyat Suriah. Tiga faktor itu menjadi kunci bagi penyelesaian krisis Suriah. Indonesia bisa mengeksploitasinya untuk memaksa para pihak eksternal keluar dari krisis Suriah. Harus diupayakan pula menciptakan lingkungan yang baik di kawasan dan sekitarnya.

D. Penutup

DPR-RI dapat meminta pemerintah untuk berperan lebih aktif dalam membantu mencari solusi damai dalam krisis Suriah. **DPR-RI** dapat mendorong pemerintah Indonesia memanfaatkan posisi. mengutamakan pendekatan soft-power untuk menjembatani pihak-pihak yang bertikai untuk memulai perundingan damai secara informal. Indonesia bisa mengutus perwakilan untuk mendekati Presiden Bashar, ataupun tokohtokoh di sekitarnya kemudian juga para oposan dan berperan secara informal mencari solusi damai.

DPR-RI juga dapat berupaya melalui diplomasi parlemen untuk membantu mencari solusi konflik Suriah dengan aktif mengangkat masalah ini dalam pertemuan-pertemuan parlemen, di antaranya dalam organiasi parlemen negara-negara Islam (PUIC) dan organisasi parlemen sedunia (IPU).

Referensi:

- 1. "Rezim Suriah Siap Hadiri Konferensi Damai," *Republika*, 28 Mei 2013, h. 19.
- 2. "Kubu Koalisi Oposisi Kian Retak," *Media Indonesia*, 28 Mei 2013, h. 12.
- 3. "UE Siap Pasok Senjata ke Suriah," *Media Indonesia*, 29 Mei 2013, h. 13.
- 4. "UE Cabut Embargo Senjata Suriah," Suara Pembaruan, 28 Mei 2013, h. 9.
- 5. "Friksi Semakin Tajam," Kompas, 30 Mei 2013, h. 8.
- 6. "Rusia Kirim Sistem Rudal ke Suriah," *Republika*, 30 Mei 2013, h. 19.
- 7. "Assad: Hezbollah Satu Barisan," *Kompas*, 31 Mei 2013.
- 8. "Oposisi Buka Front Baru," *Kompas*, 3 Juni 2013, h. 11.
- 9. "Rusia Akan Pasok Jet MiG-29 ke Suriah," Suara Pembaruan, 1 Juni 2013, h. 9.
- 10. "Al-Assad Janji Balas Serang Israel," *Media Indonesia*, 1 Juni 2013,h. 12.
- 11. "Perselisihan Bayangi Pertemuan UE–Rusia," *Kompas*, 4 Juni 2013, h. 8.
- 12. "Tentara Assad dan Hizbullah Kuasai Qusair," *Republika*, 7 Juni 2013.
- 13. "AS Siap Persenjatai Oposisi Suriah," *Republika*, 11 Juni 2013, h. 19.
- 14. "UN Talks to Germany on Syrian Refugees," *Jakarta Post*, 12 Juni 2013, h. 11.